

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SPN
(SENSUS PAJAK NASIONAL) DI KPP PRATAMA
SIDOARJO SELATAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi
Program Studi Akuntansi**



Disusun Oleh

**DHITA GITAMAYA
NIM : 2010410821**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Dhita Gitamaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 November 1991
NIM : 2010410821
Jurusan : Akuntansi
Judul : Implementasi Pelaksanaan SPN (Sensus Pajak Nasional) di KPP Prtama Sidoarjo Selatan

Disetujui dan diterima baik oleh

Dosen pembimbing.

Ketua Program Diploma

Tanggal: 2... Februari 2013

Tanggal: 2... Februari 2013



Bayu Sarjono S.E., AK., M.AK., BKP



Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., BKP., SAS

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu upaya guna peningkatan pendapatan Negara yang di dalam implementasinya pajak di gunakan untuk pembiayaan APBN dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, pengertian pajak secara umumnya adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Rochmat Soemitro (2002 : 25, Bohari). Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan perekonomian nasional guna melaksanakan arah pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak hanya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan akan tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat untuk serta dalam pembangunan tersebut. membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan pembangunan tentu dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Setiap tahun, Wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah

memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Pada tahun 2011 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional, guna keseragaman pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Sensus pajak adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak

1.2 Gambaran Umum Perusahaan

Reformasi yang telah digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah sejak lama digulirkan terhitung mulai 1984. Seiring dengan semangat perubahan yang ada, modernisasi system pun telah dilakukan sejak tahun 2002 dengan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, modernisasi Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Khusus, kemudian dilanjutkan dengan modernisasi Kantor Wilayah dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya tak terkecuali di wilayah Jawa Timur II pada tahun 2006. Guna mempercepat modernisasi, maka pada tanggal 27 November 2007 diresmikanlah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sebagai penggabungan dua Kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.01/2006

tanggal 22 desember 2006. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan menempati bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo yang terletak di jalan raya Jati nomor 6 Sidoarjo.

1.3 Ringkasan Pembahasan

Data SPN diterima dari para petugas SPN yang telah menyelesaikan pengisian FIS (Formulir Isian Sensus) yang bersumber dari wajib pajak pribadi ataupun badan yang dituju . Akan dikelola untuk dihitung berapa WOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) ataupun badan yang telah di data oleh para petugas SPN . Penghitungan data menggunakan Microsoft Excel. Adapun rincian yang harus di masukkan dalam microsof excel :

1. Cluster : Kelompok Wilayah yang akan di data oleh para petugas SPN (Sensus Pajak Nasional) . Wilayah tersebut terdiri dari Jenggolo, Pondok Mutiara , Pucang , Taman Pinang indah , Taman Pinang Asri, Taman pinang
2. UPS (Unit Pelaksanaan Sensus) : Yaitu kelompok yang telah di bentuk Setiap KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk melaksanakan sensus pajak nasional . Di KPP Pratama Sidorjo Selatan memiliki 15 UPS (unit pelaksanaan Sensus) setiap UPS (Unit Pelaksanaan Sensus) terdiri dari 3 dari pegawai KPP Pratama Sidoarjo selatan dan 1 tenaga ***Out-Sourcing***
3. FIS (Formulir Isiana Sensus) : Formulir FIS harus diisi oleh petugas sensus berdasarkan keterangan responden, kecuali apabila responden tidak dapat ditemui secara langsung. Apabila responden tidak dapat ditemui secara langsung, maka petugas sensus akan meninggalkan Formulir FIS di lokasi

sensus untuk diisi oleh responden dan akan diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh petugas sensus. Dan FIS (Formulir Isian Sensus) terdiri dari 2 macam Yaitu:

Formulir FIS-DJP.01, yaitu formulir yang digunakan untuk kategori Orang Pribadi.

Formulir FIS-DJP.02, yaitu formulir yang digunakan untuk kategori Badan

4. Kategori : Data SPN (Sensus pajak Nasional) yang telah terkumpul dibagi menjadi 4 yang terdiri dari kategori 1,2,3,4 :

Kategori 1: FIS (Formulir isian Sensus) diisi lengkap oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan

Kategori 2: Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bersedia mengisi FIS (Formulir isian Sensus)

Kategori 3: Petugas Sensus menitipkan FIS (Formulir Isian Sensus) dengan menggunakan tanda terima kepada orang yang berada di rumah saat wajib pajak yang dituju sedang tidak berada di rumah

Kategori 4: FIS (Formulir Isian Sensus) kosong / Rumah tidak ditempati oleh wajib orang pribadi

kosong / tidak ditempati oleh WP pribadi. Untuk WP yang rumahnya dikontrakan oleh para petugas SPN dianggap rumah tersebut kosong atau tidak ditempati oleh WP Pribadi.

1.4 **Kesimpulan**

Tanggal 27 November 2007 diresmikanlah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sebagai penggabungan dua Kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 desember 2006. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan menempati bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Sidoarjo yang terletak di jalan raya Jati nomor 6 Sidoarjo. Struktur organisasi yang dimiliki oleh KPP Pratama Sidoarjo selatan sudah baik untuk menunjang kegiatan yang ada dalam KPP Pratama sidoarjo selatan termasuk dalam kegiatan SPN.

1. SPN (Sensus Pajak Nasional) merupakan program terbaru dari DJP (Direktorat Jendral Pajak) untuk meningkatkan waji pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) Mekanisme Penyelenggaraan sensus pajak nasional dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak dengan menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada formulir Isian Sensus .
2. Prosedur yang digunakan dalam kegiatan SPN (Sensus Pajak Nasioanl) membantu petugas spn untuk mendapatkan data yang akurat dari setiap wp (wajib pajak) yang bersangkutan.
3. Kendala – kendala yang dihadapi saat pelaksanaan SPN (sensus pajak nasional) tidaklah mudah . banyak WP pribadi yang belum memahami pentingnya spn menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan spn .selain itu kekurangan

SDM dalam kegiatan SPN juga menjadi kendala yang dihadapi oleh setiap kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia tidak terkecuali di KPP Pratama Sidoarjo selatan. Banyaknya WP yang harus di data dengan batas waktu pengumpulan data yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) membuat KPP Pratama Sidoarjo selatan memilih jalan menggunakan tenaga *out-sourcing* .

4. Dampak yang didapat dari SPN (Sensus Pajak Nasional) untuk KPP Pratama Sidoarjo selatan sangat bagus dalam penambahan wajib pajak pribadi ataupun badan yang diharapkan penerimaan pajak tahun 2012 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan